BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian dilakukan di Dinas Tenaga kerja Kota Bandung pada seksi Penempatan Dan Perluasan Tenaga Kerja Kota Bandung untuk bidang layanan kartu ak.1 online.

3.1.1 Sejarah singkat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung merupakan suatu lembaga Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mengemban tugas di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 dengan struktur organisasi lebih ramping tetapi kaya fungsi.

Sejarah berdirinya bidang ketenagakerjaan tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak berdirinya pemerintahan Republik Indonesia sampai sekarang. Departemen atau Kementrian yang di serahi tugas untuk menangani masalah ketenagakerjaan berulang kali mengalami perubahan, baik berupa pembentukan baru, penyesuaian maupun penggabungan. Perubahan organisasi tersebut disebabkan oleh berkembangnya beban kerja yang harus ditangani.

Historis perubahan struktur organisasi yang membidangi ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: Pertama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Organisasi Departemen Tenaga Kerja berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, struktur organisasinya diatur dalam Keputusan Menteri NAKERTRANSKOP Nomor: KEP/100/MEN/1975. Dalam perkembangannya organisasi Departemen NAKERTRANSKOP mengalami perubahan dengan dipindahkannya urusan koperasi ke Departemen Perdagangan, kemudian disempurnakan kembali setelah masalah urusan transmigrasi dilimpahkan ke Departemen Transmigrasi.

Dengan peninjauan kembali UU No. 25 Tahun 1997, selain itu telah diratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 ke dalam KEPRES 83 Tahun 1997 tentang kebebasan berserikat bagi para pekerja. Pengesahan Konvensi ILO No. 105 ke dalam UU RI No. 19 tahun 1999 mengenai penghapusan kerja paksa, pengesahan konvensi ILO No. 138 ke dalam UU RI No. 20 Tahun 1999 mengenai Upah Minimum untuk diperbolehkan bekerja dan pengesahan konvensi ILO No. 111 Tahun 1985 ke dalam UU RI no. 21 tahun 1999 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Visi Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 adalah ***"Memantapkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat"***, yang diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status, sedangkan Visi Dinas

TenagaKerja Kota Bandung tahun 2009-2013 adalah ***"Terwujudnya Penyelenggara Ketenagakerjaan Terbaik".*** Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka seluruh staf dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung harus memahami makna yang terkandung di dalam visi tersebut.

Makna yang terkandung dalam visi Dinas Tenaga Kerja adalah :

Pertama, bahwa Terwujudnya Penyelenggara Ketenagakerjaan Terbaik ini mengandung arti bahwa Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewajiban untuk dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk menciptakan perluasan kerja, serta mengerahkan warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengikuti program transmigrasi.

Kedua, mengandung arti bahwa Dinas Tenaga Kerja sebagai suatu lembaga yang harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif, peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja, membina lembaga-lembaga latihan swasta, melakukan akreditasi lembaga latihan swasta serta sertifikasi kemampuan.Sehingga tenaga-tenaga tersebut diatas dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar nasional / internasional.

Ketiga, bahwa Dinas Tenaga Kerja ini sebagai suatu lembaga yang dapat berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, mencakup pembinaan terhadap

pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundang-undang ketenagakerjaan, penanganan permasalahan / perselisihan ketenagakerjaan, memfasilitasi penetapan upah minimum kota, serta memberikan perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha, dengan melalui program dan kegiatan yang berorientasi terhadap peningkatan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan jaminan sosial bagi tenaga kerja serta peningkatan penegakkan hukum ketenagakerjaan.

Keempat, bahwa Dinas Tenaga Kerja mampu memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan wilayah transmigrasi regional, dengan peningkatan lokasi transmigrasi, pengerahan penempatan transmigran, dan penyuluhan kepada calon transmigran.

Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan serta sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD Tahun 2009 – 2013, misi Dinas Tenaga Kerja tercakup pada misi kedua Kota Bandung, yaitu : "Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota", maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja

Misi ini memiliki makna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui pembinaan terhadap lembaga – lembaga latihan swasta dan akreditasinya serta sertifikasi kemampuan. Sehingga tenaga-tenaga tersebut diatas dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja.

2. Peningkatan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja

Misi ini bermakna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat memfasilitasi pencari kerja dan calon pengguna tenaga kerja untuk memperoleh informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja terpadu/job fair, bursa kerja wilayah maupun melalui program atau kegiatan yang orientasinya untuk memberikan informasi kerja kepada masyarakat dan informasi calon tenaga kerja kepada calon pengguna tenaga kerja. Begitu pun perluasan kerja dapat dilakukan dengan berbagai macam program / kegiatan, seperti penciptaan wira usaha baru, penerapan dan pemanduan teknologi padat karya (PP-TPK), untuk penanganan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau ter-PHK melalui kegiatan padat karya produktif (PKP), dan pemberian kerja sementara.

3. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial

Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat berperan sebagai fasilitator di dalam perwujudan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, dengan melalui berbagai program dan

kegiatan pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundang-undang ketenagakerjaan, penanganan permasalahan/perselisihan ketenagakerjaan serta mengkoordinir dan membantu memfasilitasi Penetapan Upah Minimum Kota. Juga harus berperan dalam fungsi perlindungan tenaga kerja baik terhadap hak-hak pekerja, kesehatan maupun keselamatannya. Begitu pula harus dapat melindungi kepentingan pengusaha dariintervensi / campur tangan pihak ketiga yang dapat merusak hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

4. Peningkatan ketersediaan lokasi transmigrasi dan penempatan transmigran

Dalam hal transmigrasi, sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola transmigrasi yaitu harus dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan yaitu tentang berbagai hal ketransmigrasian, baik keuntungannya, manfaat maupun terhadap prospek masa depan dari masyarakat tersebut melalui berbagai pembinaan dan penyuluhan. Sehingga dapat mengerahkan masyarakat sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan transmigrasi, baik lokal maupun ke luar Propinsi Jawa Barat.

3.1.3 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Mengacu pada visi dan misi, tujuan Pemerintah Kota Bandung yaitu : ”Memantapkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Agenda Prioritas Bandung Makmur), dengan sasaran ”Meningkatkan perluasan kesempatan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi *core competency* kota”. Tujuan yang ingin dicapai dalam tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianyatenagakerjaterampil dan produktifsesuaikebutuhan pasar kerja dan duniakerja

Sasaran:

1) Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas , produktif dan berdaya saing tinggi
2) Meningkatkan keterampilan dan produktifitas kerja

2. Terlaksananyapeningkatanpenempatantenagakerja dan perluasankerja.

Sasaran :

1) Tersedianya infomasi kerja
2) Terciptanya kesempatan kerja
3) Terciptanya wira usaha baru

3. Terwujudnyahubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabatdalamsuasanakemitraan yang dapatmendorongberkembangnyalembagaketenagakerjaan dan duniausaha, sertameningkatnyakesejahteraanpekerja, serta terwujudnya kesadaran dan ketaatan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan norma kesehatan dan keselamatan kerja, serta peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Sasaran :

1) Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan
2) Meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

3) Meningkatnya kesejahteraan pekerja sesuai dengan kemajuan dan kemampuan yang dicapai perusahaan.
4) Tegaknya supremasi hukum ketenagakerjaan, dan berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan
5) Meningkatnya keselamatan, kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
6) Terlaksananyapeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiprogramtransmigrasi.

Sasaran :

1). Meningkatnya lokasi transmigrasi

2). Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi

3.1.4 Tugas Pokok dan fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009dan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota Bandung dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

3.1.5 Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut target kebijakan terdiri dari kebijakan internal, yaitu kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam mengelola pelaksanaan program pembangunan, dan kedua adalah kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kesesuaian arah Kebijakan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 yaitu arah kebijakan pertama : penataan dan optimalisasi prosedur investasi dalam

meningkatkan kesempatan kerja di Kota Bandung melalui pelayanan satu pintu, serta kebijakan kedua : pendukungan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Memperhatikan arah kebijakan Kota Bandung, maka kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, serta mengarahkan lembaga latihan kerja untuk memenuhi standar kompetensi kerja yang terakreditasi.
2. Perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan, memfasilitasi, memotivasi terciptanya perluasan kerja.
3. Mengupayakan terjalinnya hubungan industrial harmonis, dinamis, adil dan bermartabat dalam suasana kemitraan yang dapat mendorong berkembangnya lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha, serta meningkatnya kesejahteraan pekerja, serta terwujudnya kesadaran dan ketaatan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan norma kesehatan dan keselamatan kerja, serta peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

   Penjajagan lokasi transmigrasi dan berusaha melakukan kerjasama antar daerah serta perluasan lokasi transmigrasi dalam upaya penempatan transmigran

3.1.6 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan

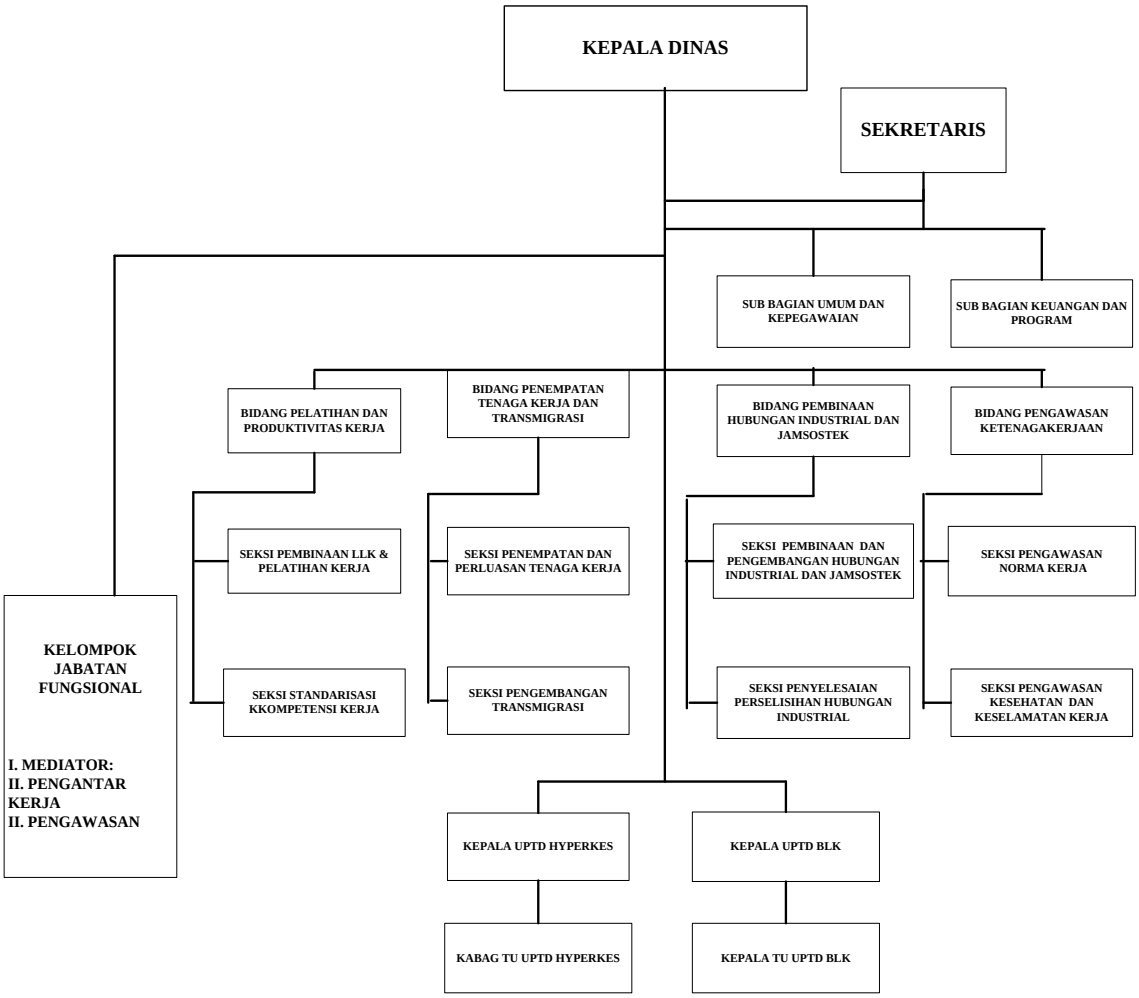
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, struktur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahkan :
    a. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja
    b. Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja
4. Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
    a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
    b. Seksi Transmigrasi
5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
    a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
    b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    a. Seksi Pengawasan Norma Kerja
    b. Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 265/Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

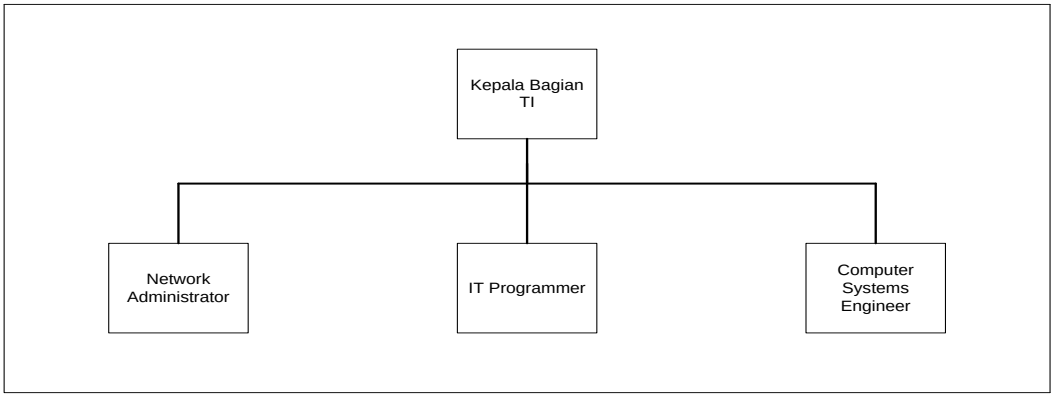
Bandung, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, yaitu :

7. UPT Balai Latihan Kerja (BLK), dan
    a. Sub Bagian Tata Usaha UPT BLK
8. UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes), dan
    a. Sub Bagian Tata Usaha UPT Hiperkes



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

3.1.7 Struktur Organisasi Divisi TI



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi

3.1.8 Visi dan Misi TI

Visi : "Memberikan Kemudahan dalam pelayanan Ketenagakerjaan"

Misi :

1. Membangun sebuah program aplikasi yang dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi Operator Bursa Kerja Online
2. Meningkatkan program peningkatan kesempatan kerja
3. Memberikan aksebilitas dalam pelayanan kartu AK.1 Online bagi para Pencari Kerja

3.1.9 Tujuan TI pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

1. Memberikan solusi TI dengan kualitas dan mengedepankan keamanan data
2. Meningkatkan program dan rencana pendaya gunaan sumber daya TI
3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pelayanan public

3.1.10 Sasaran pengelolaan TI pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

1. Meningkatnya standar kualitas pelayanan dengan TI di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
2. Terwujudnya program pemerintah dengan pengelolaan teknologi informasi
3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

3.1.11 Deskripsi Tugas pada Divisi TI

Adapun deskripsi tugas yang ada pada Divisi TI Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bagian TI

a. Menyusun kebutuhan anggaran informasi teknologi dan kebutuhan perangkat komputer.

b. Menyusun anggaran biaya *overhead* bagian perencanaan.

2. *Network* Administrator

Tugas dan tanggung jawab profesi IT *Network* Administrator adalah mengurusi, mengoperasi, maintain, dan perawatan jaringan LAN maupun WAN, manajemen sistem serta dukungan terhadap perangkat kerasnya, mengarsipkan data, serta maintain dan perawatan komputer.

3. IT *Programmer*

Tugas dan tanggung jawab profesi IT *Programmer* adalah mengambil bagian dalam pengembangan dan integrasi perangkat lunak, mengembangkan secara aktif kemampuan dalam pengembangan perangkat lunak, menerima

permintaan user untuk masalah-masalah yang harus diselesaikan, menyediakan dukungan dan penyelesaian masalah konsumen baik untuk konsumen internal maupun eksternal, bertanggung jawab atas kepuasan terkini pelanggan, melakukan tugas-tugas yang berkaitan dan tanggung jawab yang diminta.

4. Computer Sytems Engineers

a. Berkomunikasi dengan staf atau klien untuk memahami persyaratan system tertentu.
b. Memberikan saran pada biaya proyek, konsep desain, atau perubahan desain.
c. Dokumen desain spesifikasi, petunjuk instalasi, dan system informasi terkait lainnya.
d. Mengidentifikasi system data, perangkat keras, atau komponen perangkat lunak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
e. Memberikan pedoman untuk menerapkan system yang aman untuk pelanggan atau tim instalasi.
f. Memonitor operasi system untuk mendeteksi masalah potensial

3.1.11 Tujuan SI Layanan AK.1*Online*

Adapun tujuan dari Sistem Informasi Layanan AK.1 Online yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung adalah sebagai berikut:

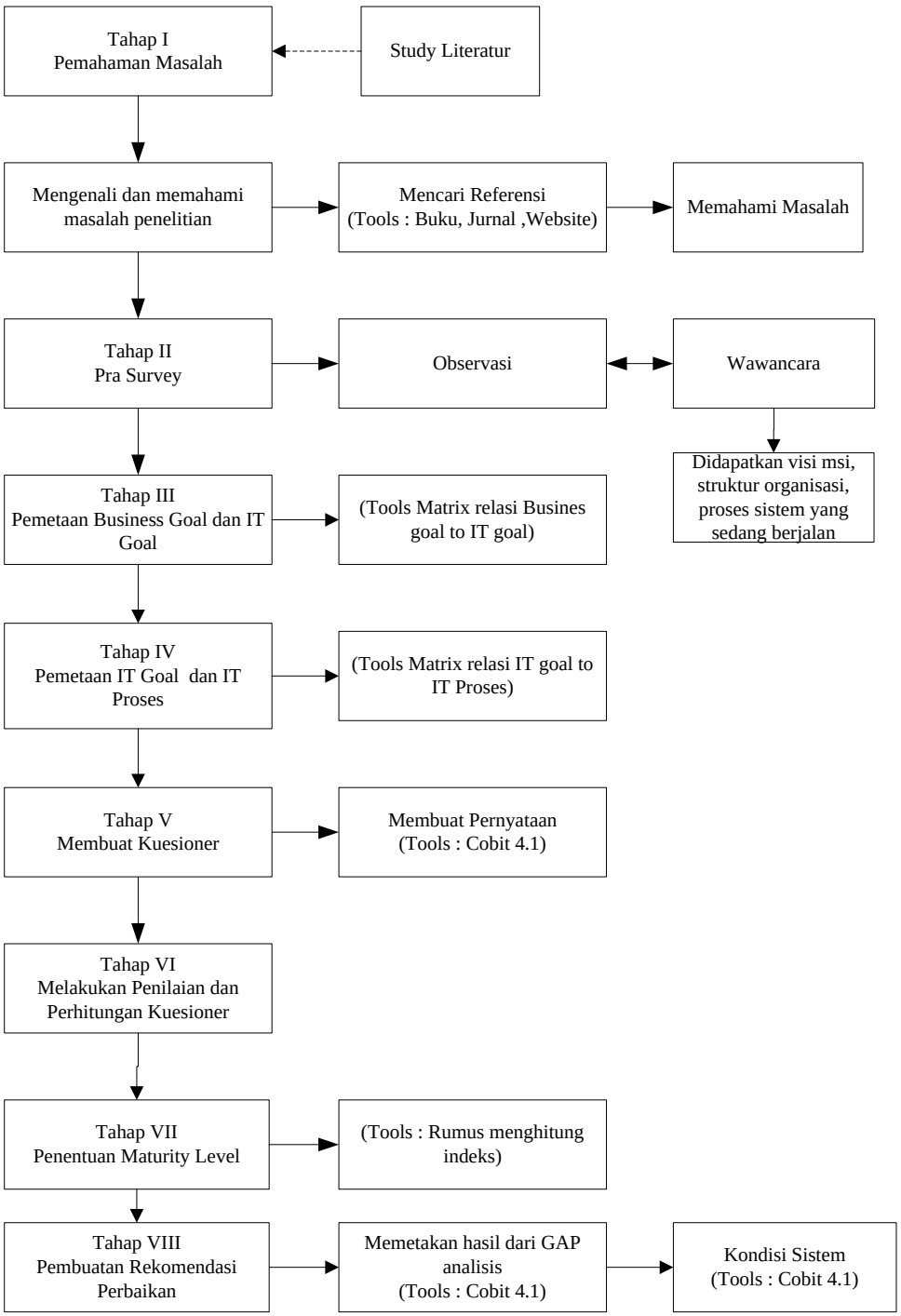
1. Untuk memberikan kemudahan bagi para Pencari Kerja dalam mengakses layanan AK.1 Online

2. Untuk kemudahan dalam pelayanan pembuatan kartu AK.1 tanpa harus mengantri

   Memfasilitasi pada seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja dalam memberikan informasi dan penyebarluasan lowongan kerja bagi para Pencari Kerja

3.2 Tahapan Penelitian

Skema alur dalam tahapan penelitian tentang Audit Sistem Informasi Pelayanan Kartu AK.1 *Online*ini dapat dilihat pada gambar 3.3



Gambar 3.3 Tahapan Penelitian

a) Tahapan I (Pemahaman Masalah)

Pada tahapan ini terdapat alat bantu yang digunakan yaitu studi literature. Pada tahap pertama pemahaman masalah dengan mengenali dan memahami masalah penelitian yang akan kita lakukan kemudian selanjutnya kita mencari referensi-referensi buku atau jurnal yang ada pada internet sehingga pada akhirnya kita sebagai penulis akan memahami mengenai permasalahan tentang penelitian kita.

b) Tahapan II (Pra Survei)

Pada tahap kedua, setelah memahami terhadap permasalahan penelian kita, maka selanjutnya kita melakukan survey awal mengenai objek yang akan di teliti.Pada tahap ini ada dua kajian yang akan ditempuh, yaitu kajian observasi dan wawancara, untuk mengetahui mengenai objek penelitian kita, proses bisnis yang ada pada tempat yang akan kita teliti, tujuan system yang akan kita teliti selain itu wawancara yang kita lakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja Sistem Informasi layanan AK.1 *Online* yang akan kita teliti, serta dokumen-dokumen yang perlu untuk analisis lebih lanjut. Maka dari tahapan ini kita akan memahami struktur organisasi, kinerja sistem dan tujuan sistem yang akan kita teliti dan proses bisnis yang berjalan pada objek penelitian kita.

c) Tahapan III (Pemetaan Bisnis *Goals* dan IT *Goals*)

Pada tahap ketiga ini dimana apabila kita sudah memahi mengenal objek penelitian kita maka pada tahap ini kita akan memulai dengan menetapkan Bisnis *Goals* dan IT *Goals*, dimana pada penetapan Bisnis dan IT

*Goals*dapat ditentukan dengan kita mengetahui terlebih dahulu visi misi, tujuan dan sasaran dari divisi it dan juga sistem yang akan kita evaluasi , maka selanjutnya kita dapat menyelaraskan tujuan tersebut kepada matriks Tujuan Bisnis (*Business Goals*) dan tujuan TI (IT *Goals*) maka selanjutnya kita akan mengetahui perspektif apa yang kita pilih dalam matriks penyelarasan tujuan bisnis yang selanjutnya kita juga akan mengetahui tujuan TI apa yang kita dapatkan pada perspektif tersebut yang selanjutnya kita akan mengetahui domain yang akan kita pilih.

d) Tahapan IV (Pemetaan IT Goal dan Proses pada IT COBIT)

Pada tahap ini dimana apabila kita telah menetapkan Bisnis Goals dan IT Goals dan kita telah mengetahui perspektif apa yang kita pilh dalam matriks penyelarasan tujuan bisnis maka selanjutnya kita akan mengetahui domain apa yang akan kita pilih yang dimana domain itu bisa kita lihat pada IT Goals yang sudah kita pilih maka disitu pula kita bisa meliat proses pada IT COBIT apakah yang terpilih maka selanjutnya apabila kita sudah mengetahui maka kita memetakan domain dan proses IT COBIT dengan membuat tabel pemetaan IT Goal dan Proses pada IT COBIT.

e) Tahapan V (Membuat Kuesioner)

Pada tahap kelima ini apabila kita telah memetakan Domain dan Proses pada IT COBIT maka selanjutnya tahap ini dilakukan pembuatan quesioner dengan melihat tujuan Bisnis Goals dan IT Goals dan Pemetaan Domain dan Proses pada IT COBIT, kuesioner yang akan kita buat akan sesuai dengan aturan COBIT yang ada pada COBIT *framework 4.1* dengan

menentukan membuat kuesioner sesuai domain yang telah kita tentukan, yang dimana nantinya akan ditujukan ke sejumlah responden sesuai dengan kuesioner yang kita buat. Yang dimana kuesioner ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dengan tujuan sebagai alat bantu kita sebelum melakukan pengukuran tingkat kematangan suatu sistem yang akan kita evaluasi atau yang biasa disebut dengan maturity level.

f) Tahap VI (Melakukan Penilaian dan Perhitungan kuesioner)

Tahapan ini apabila kita telah membuat questioner maka pada tahapan ini diawali dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah responden yang telah ditentukan, kemudian selanjutnya kita melakukan penilaian dan perhitungan kuesioner yang dimana perhitungan kuesioner selanjutnya akan berpengaruh pada perhitungan *maturity* level

g) Tahap VII (Penentuan *Maturity* Level)

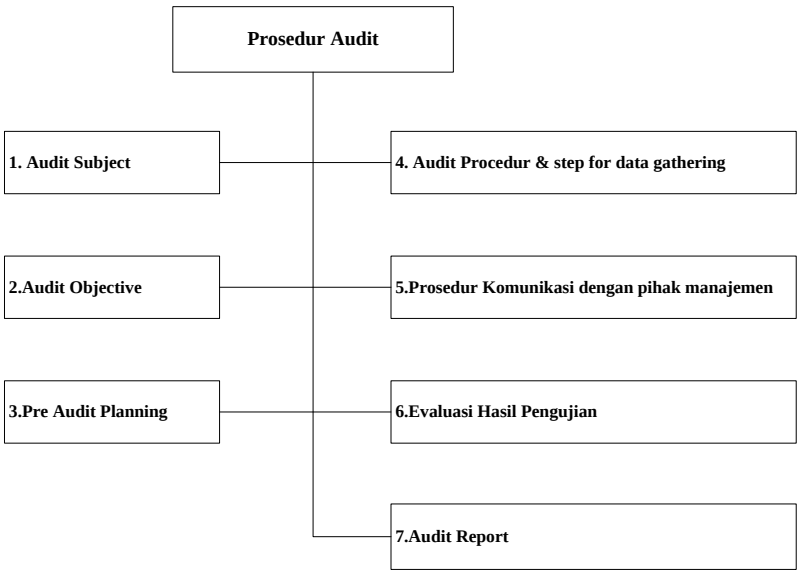
Tahapan ini apabila kita telah mengetahui perhitungan kuesioner yang telah ditentukan, maka pada tahap penentuan*maturitylevel* ini kita akan menghitung dengan melihat dari perhitungan kuesioner pada setiap proses atau pada setiap domain yang kita pilih, maka setelah kita mengetahui hasil dari perhitungan tersebut kita akan mengetahui pada level manakah tingkat kematangan sistem tersebut.

h) Tahapan VIII (Pembuatan Rekomendasi Perbaikan)

Pada tahapan ini apabila kita telah mengetahui tingkat kematangan system yang kita evaluasi maka pada tahapan akhir ini dilakukan penyusunan

rekomendasi perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi sistem dari aspek proses TI dan menyatakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan diberikan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran disusun berdasarkan kemungkinan dilaksanakannya optimalisasi penelitian ini yang akan dikembangkan di masa yang akan datang**.**

3.2.1 Skema Audit



Gambar 3.4 Skema Audit

Ada 7 langkah prosedur audit menurut Swastika (2007) yaitu : Audit *Subject* , Audit *Objective*, *Preaudit Planning*, *Audit Procedur & step for data gathering,* Evaluasi hasil pengujian, Audit *Report*

Dengan keterangan sebagai berikut :

1. Audit *Subject*: Audit sistem informasi ini dilakukan di Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

2. Audit *Objective* : Tujuan dilaksanakan proses audit sistem informasi pelayanan AK.1 online ini antara lain :
    a) Untuk mengetahui bagaimana kinerja Sistem Informasi pelayanan AK.1 *Online* yang sedang berjalan.
    b) Mengevaluasi kinerja sistem pelayanan AK.1 Online yang telah dibangun oleh Divisi TI Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
    c) Memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan terhadap kinerja sistem informasi pelayanan AK.1 Online yang telah berjalan saat ini agar lebih baik dalam mendukung proses bisnis yang ada
3. *Preaudit planning* : Persiapan dalam melakukan audit, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan
4. *Audit Procedur & step for data gathering*: langkah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan sistem layanan AK.1 online
5. Evaluasi hasil pengujian : pembuatan quesioner yang mengacu pada control cobit
6. Audit *Report*: Melakukan penilaian yang dilakukan hasil dari perhitungan kuesioner

3.2.2 Analisis Lingkungan TI

Sumber daya yang tersedia telah menggunakan Teknologi Informasi (TI) yang ada serta dapat mengolah data yang dibutuhkan sehingga dapat dihasilkan Sistem Informasi (SI) yang berguna untuk semua tingkatan manajemen. Sumber daya yang perlu dikelola oleh institusi yaitu :

1. Aplikasi

Aplikasi merupakan sarana atau *tool* yang digunakan untuk mengolah dan menyimpulkan atau meringkas, baik prosedur manual maupun yang terprogram. Aplikasi (Sistem Informasi Pelayanan AK.1 Online) . Untuk memperoleh informasi yang baik maka harus memiliki standar operasi atau prosedur yang baku dalam penggunaanya. Fitur yang bisa dilakukan oleh sistem ini adalah tentang pendaftaran AK.1. Dengan adanya sistem ini memudahkan Pencari Kerja dalam membuat Kartu AK.1 dan memperoleh informasi yang efektif.

2. Informasi

Informasi diperoleh dari hasil pengelolaan data. Data yang berkaitan dengan layanan AK.1 online ini.

3. Infrastruktur

Infrastruktur meliputi fasilitas maupun teknologi yang ada di dinas sebagai pendukung dalam melakukan fungsi bisnis utamanya. Dinas menyediakan beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh semua bagian. Sedangkan teknologi yang digunakan pada umumnya sudah mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Teknologi yang digunakan sudah mempunyai standar baku mengenai penggunaan TI dan standarisasi mengenai kapan teknologi yang baru diimplementasikan pada institusi tersebut serta sejauh mana penggunaan TI ya baru dapat membantu pihak-pihak terkait dalam memperoleh informasi yang berkualitas. Sistem Informasi Layanan AK.1 online dikembangkan dengan menggunakan :

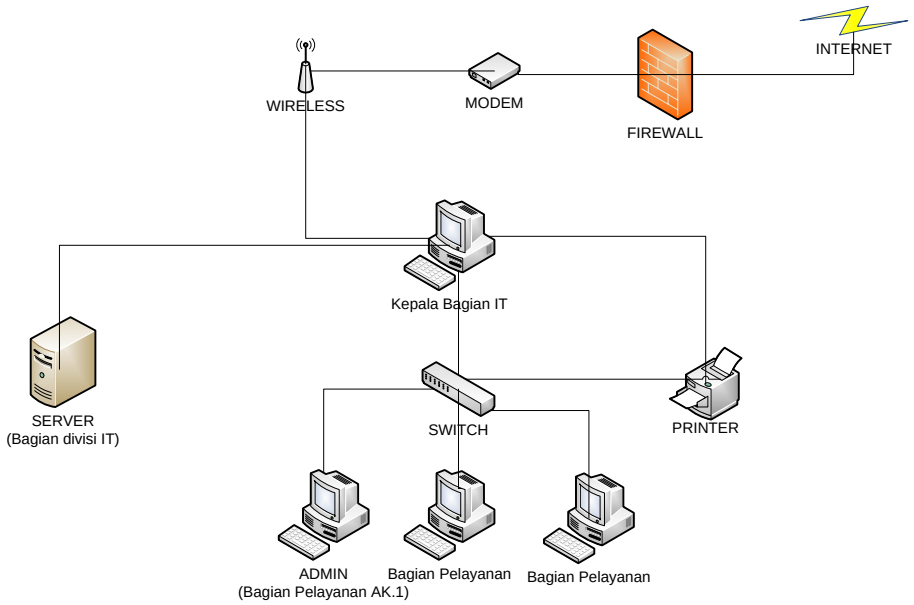
a. Aplikasi Joomla

b. Database MySQL

c. Sistem Operasi Windows 7

d. Jaringan Internet

Gambar Arsitektur jaringan yang ada di Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja pada bidang Pelyanan Kartu AK.1 sebagai berikut :



Gambar 3.5 Arsitektur Jaringan

4. Manusia

Sumber daya manusia pada istitusi sebagian besar dapat memahami dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada serta teknologi yang tersedia dikarenakan setiap terdapat penggunaan TI yang baru , maka pihak institusi akan megadakan pelatihan terhadap penggunaan TI tersebut.

5. Kebijakan eksternal

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor : 88 *Concerning The Organizatiin*

of The Emplcyment Service (Konvensi ILO Nomor : 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.2.3 Strategi Sistem Informasi Pelayanan AK.1 online

a. Business Need

1. Mewujudkan kemudahan dalam memberikan pelayanan publik
2. Mewujudkan loyalitas pengguna terhadap sistem Informasi Pelayanan AK.1 online
3. Sistem Informasi Pelayanan AK.1 online ini dapat mereduksi waktu yang dilakukan pada website secaracepat

b. *Customer Need*

1. Sistem Informasi Pelayanan AK.1 online ini memenuhi kebutuhan informasi yang akurat, tepat dan cepat yang meliputi informasi Bursa Kerja Online
2. Kemudahan dalam mengakses sistem layanan AK.1 online untuk Pencari Kerja.
3. Kemudahan mendapat pelayanan solusi atas keluhan, insiden dan problem.
4. Kemudahan akses Sistem pelayanan AK.1 melalui jaringan internet
5. Kemudahan mendapat pelayanan solusi atas keluhan, insiden dan problem.

3.2.4 Penerjemah Visi dan Misi ke Sasaran Strategis

Penerjemah Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ke dalam sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1 Penerjemah Visi Misi Tujuan Dinas Tenaga Kerja kedalam sasaran strategis

Misi	Tujuan	Sasaran
➢ Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja	➢ Tersedianya tenaga kerja terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja	➢ Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas , produktif dan berdaya saing tinggi ➢ Meningkatkan keterampilan dan produktifitas kerja
➢ Peningkatan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja	➢ Terlaksananya peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja	➢ Tersedianya infomasi kerja ➢ Terciptanya kesempatan kerja ➢ Terciptanya wira usaha baru
➢ Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial	➢ Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat dalam suasana kemitraan yang dapat mendorong berkembangnya lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha, serta meningkatnya kesejahteraan pekerja, serta terwujudnya kesadaran dan ketaatan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan norma	➢ Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan ➢ Meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ➢ Meningkatnya kesejahteraan pekerja sesuai dengan kemajuan dan kemampuan yang dicapai perusahaan. ➢ Tegaknya supremasi hukum ketenagakerjaan, dan berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan ➢ Meningkatnya keselamatan, kesehatan

	kesehatan dan keselamatan kerja, serta peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
➢ Peningkatan ketersediaan lokasi transmigrasi dan penempatan transmigran	➢ Terlaksananya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi.	➢ Meningkatnya lokasi transmigrasi ➢ Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi

Tabel 3.2 Penerjemah Visi dan Misi Divisi IT kedalam tujuan dan sasaran strategis

Misi	Tujuan	Sasaran
➢ Membangun sebuah program aplikasi yang dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi Operator Bursa Kerja Online	➢ Memberikan solusi TI dengan kualitas dan mengedepankan keamanan data	➢ Meningkatnya standar kualitas pelayanan dengan TI di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
➢ Memberikan aksebilitas dalam pelayanan kartu AK.1 Online bagi para Pencari Kerja	➢ Meningkatkan program dan rencana pendaya gunaan sumber daya TI	➢ Terwujudnya program pemerintah dengan pengelolaan teknologi informasi
➢ Peningkatan dalam pelayanan kartu AK.1 *Online*	➢ Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pelayanan publik	➢ Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

3.3 Rancangan Model Proses COBIT

3.3.1 Pemetaan *Business Goal* dan *strategic Objective*

Business Goal didapat dari Visi dan Misi Divisi TI di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran seperti yang telah dituliskan di bagian atas. Selanjutnya dilakukan pemetaan dengan *business Goal* berdasarkan standar COBIT 4.1 yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Perspektif		*Business Goal*
Perspektif Keuangan	1	Penyediaan Pengendalian investasi yang baik dari bisnis yang dibangkitkan
	2	Pengelolaan resiko bisnis yang terkait dengan teknologi informasi
	3	Peningkatan transparasi dana tata kelola perusahaan
Perspektif Pelanggan	4	Peningkatan layanan dan orientasi terhadap pelayanan
	5	Penawaran produk dan jasa kompetitif
	6	Penentuan ketersediaan dan kelancaran layanan
	7	Penciptaan ketangkasan untuk menjawab permintaan bisnis yang berubah
	8	Pencapaian optimasi biaya dari penyampaian layanan
	9	Perolehan informasi yang bermanfaat dan handal untuk membuat keputusan strategis
Perspektif proses bisnis	10	Peningkatan dan Pemeliharaan fungsionalitas proses bisnis
	11	Penurunan biaya proses bisnis
	12	Penyediaan kepatutan terhadap hukum eksternal, regulasi dan kontrak
	13	Penyediaan keputusan terhadap kebijakan internal
	14	Pengelolaan perubahan bisnis
	15	Peningkatan dan pengelolaan produktivitas operasional dan staf
Perspektif Pembelajaran &Pertumbuhan	16	Pengelolaan inovasi produk dan bisnis
	17	Perolehan dan pemeliharaan karyawan yang cakap dan termotivasi

Perspektif	Strategic Objective
Perspektif Pelanggan	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
	Meningkatnya standar kualitas pelayanan dengan TI di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
	Terwujudnya program pemerintah dengan pengelolaan teknologi informasi

Tabel 3.3 *Linking business goal* dan *strategic objective*

3.3.2 Keterkaitan Sasaran Strategis dan *Business Goal*

Berikut ini digambarkan lebih jelas mengenai keterkaitan antara sasaran strategi pada Divisi IT dengan business goal yang didapatkan hasil dari pemetaan seperti diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Keterkaitan *strategic objective* dan *Business Goal* COBIT

No	Perspektif	Strategic Objective	Business Goal
1	Pelanggan /Pelayanan	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	BG4. Peningkatan layanan dan orientasi terhadap pelayanan
		Meningkatnya standar kualitas pelayanan dengan TI di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung	
		Terwujudnya program pemerintah dengan pengelolaan teknologi informasi dalam pelaksanaan bursa kerjaonline	

3.3.3 Pemetaan Business Goal ke IT Goal

Tabel 3.5

Keterkaitan business Goal ke IT Goal

Perspektif	No	Business Goal		IT Goal
Pelanggan/ Pelayanan	4	Peningkatan layanan dan orientasi terhadap pelayanan	3	Kepastian akan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran dan tingkatan layanan
			23	Jaminan bahwa layanan teknologi informasi yang

				tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan

3.3.4 Penyelarasan IT goal dan IT Proses pada COBIT

Berdasarkan dari hasil IT Goal yang terkait dengan business goal maka dapat dipetakan keterkaitan dari IT Goal kedalam Proses-proses IT pada COBIT yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

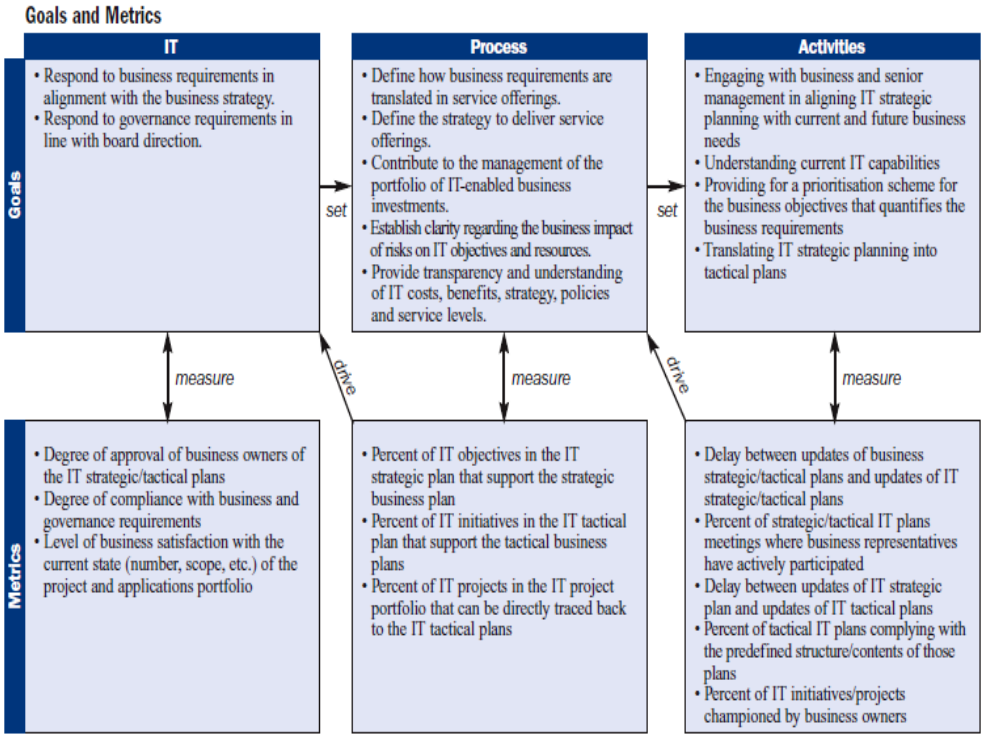
Keterkaitan IT Goal dengan IT Proses COBIT

No	IT Goals	Proses TI COBIT
3	Kepastian akan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran dan tingkatan layanan.	PO8 – Menjaga kualitas AI4 – Menjalankan operasi dan menggunakannya DS1 – Mendefinisikan dan mengatur tingkat pelayanan DS2 – Mengatur pelayanan bagi pihak ke tiga DS7 – Mendidik dan melatih user DS8 – Mengelola bantuan layanan dan insiden DS10 – Mengatur masalah DS 13 – Mengatur operasi
23	Jaminan bahwa layanan teknologi informasi yang tersedia sesuai dengan yangdibutuhkan	DS3 – Mengatur kinerja dan kapasitas DS4 – Memastikan pelayanan yang berkelanjutan DS8 – Mengelola bantuan layanan dan insiden DS 13 – Mengatur operasi

3.4 Penyusunan dan Pembuatan Kuesioner

Dengan berdasarkan pada *E-book* COBIT 4.1 IT *Governance Institute*, pembuatan kuesioner bisa dilihat pada tabel *Goals and metrics.* Pada bagian tabel

metrics di setiap prosesnya terdapat point-point yang menjadi patokan pembuatan pertanyaan untuk kuesioner. Seperti pada gambar tabel berikut :



Gambar 3.6 *Goals and metric*